

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, kontestasi wacana dalam pembangunan *geothermal* di Nagari Batu Bajanjang peneliti melihat adanya kesamaan dalam mendominasi wacana antara pemerintah dengan LSM. Namun pada saat ini wacana yang dibangun oleh LBH dan WALHI telah mengakibatkan wacana pembangunan *geothermal* mengalami penundaan untuk sementara waktu. LBH dan WALHI telah berhasil mengantarkan masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk sementara waktu. Bagaimana nantinya tentu akan ada langkah yang akan dibuat oleh pemerintah mengingat bahwa telah terjadinya kesepakatan penggunaan lahan oleh PT Hitay selama 37 tahun tentu pemerintah akan mengambil langkah professional dan tetap melanjutkan wacana pembangunan *geothermal* ke depannya.

Berdasarkan hasil penelitian melalui data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi yang telah dilakukan di Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Terkait kontestasi wacana dalam pembangunan *geothermal*. Dari hasil ini peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

Wacana pembangunan *geothermal* yang berada dekat dengan lahan pertanian produktif masyarakat menimbulkan penolakan-penolakan oleh masyarakat terutama pada masyarakat yang hidup bertani dan berladang. Penolakan wacana pembangunan *geothermal* di Nagari Batu Bajanjang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Nagari

Batu Bajanjang melainkan penolakan ini dilakukan oleh aliansi masyarakat yang berada di salangka Gunung Talang yaitu sebuah komunitas milik masyarakat yang mengatasnamakan HIMAPAGTA atau Himpunan Masyarakat Salingka Gunung Talang. Keterlibatan aliansi masyarakat salingka Gunung terhadap penolakan pembangunan *geothermal* tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat akan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan tersebut terhadap pertanian mereka. Selama ini para petani dan peladang memanfaatkan sumber hutan lindung sebagai sumber mata air yang mangairi ladang-ladang mereka. Bagi masyarakat salingka Gunung Talang dampak ini nantinya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat nagari Batu Bajanjang melainkan seluruh nagari yang berada pada salingka Gunung Talang.

Wacana kesejahteraan masyarakat, pembukaan lapangan pekerjaan dalam pembangunan *geothermal* tidak bisa diterima oleh masyarakat karena dianggap tidak pantas untuk menggantikan aktifitas pertanian masyarakat karena bagi masyarakat dengan bertani sudah bisa memenuhi kebutuhan mereka dan pembangunan *geothermal* terlalu berisiko terhadap kerusakan lingkungan. Selanjutnya wacana pembangunan *geothermal* dinilai oleh masyarakat sebagai kepentingan investasi semata tidak dinilai sebagai pembangunan yang sifatnya pro masyarakat. Wacana seperti kesejahteraan masyarakat, pembukaan lapangan pekerjaan hanya dinilai sebagai pemanis atau sebagai strategi dalam mengambil simpati masyarakat namun kenyataannya masih ada masyarakat yang kontra terhadap wacana pembangunan *geothermal* seperti komunitas HIMAPAGTA yang mengakibatkan konflik dalam pembangunan ini.

Lahirnya sebuah wacana akibat suatu pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan menimbulkan pergerakan kuasa dari masyarakat. Kekuasaan itu ada dimana-mana dan wacana seperti jaringan yang menjalar dalam kekuasaan tersebut, setidaknya itu yang peneliti tangkap dari pemikiran Foucault. Kemudian keadaan dilapangan merupakan basis yang memberikan sebuah regulasi terhadap wacana yang muncul baik itu dari pemerintah ke masyarakat maupun dari masyarakat ke pemerintah (sisi balik wacana) yang berupa kekuasaan pengetahuan terhadap pembangunan *geothermal* dengan resistensi masyarakat terhadap pembangunan tersebut. Munculnya sebuah wacana bermula dari pengetahuan (disisi ini bermula dari pemerintahan dalam pembangunan sumber daya alam) yang kemudian memuat berbagai kepentingan yang dipenjarakan dan terbatas untuk di ketahui oleh masyarakat sebagai sasaran pembangunan tersebut. Masyarakat sebagai saran pembangunan dari pemanfaatan lingkungan alam tempat hidup tentu juga memiliki pengetahuan tentang lingkungannya. Sehingga masyarakat juga memiliki pengetahuan dan melahirkan wacana yang muncul sebagai bentuk penolakan.

Dari studi ini, sejauh penelitian yang sudah dilakukan dan berbagai fenomena dilapangan yang ditelusuri secara holistik maka peneliti beranggapan bahwa sampai saat ini proses pembangunan *geothermal* terhenti karena kasus panjang pemahaman kepada masyarakat berujung penolakan yang mengakibatkan tersendatnya proses pembangunan. Kemudian masyarakat selalu waspada dan menanti serta menuntut kejelasan (baik berupa dampak, proses, transparansi, keterlibatan dan masa depan

masyarakat yang berada disekitar pembangunan tersebut) dari pemerintah. Akibatnya kekuasaan dibawa jatuh dalam genangan kekuasaan yang dijalankan oleh masyarakat ke pemerintah melalui sikap resisten atau perlawanan dalam bentuk-bentuk sederhana sampai ekstrem. Anggapan penulis, jelas bahwa wacana dan kekuasaan kalah dengan resistensi. Masyarakat sedang duduk santai sedangkan pemerintah sibuk mencari celah untuk membendung perlawanan masyarakat tersebut.

B. Saran

Berangkat dari persoalan yang terjadi pada Nagari Batu Bajang terhadap wacana pembangunan *geothermal* diharapkan bagi pemangku kepentingan agar dapat membangun wadah bersama yang melibatkan seluruh komponen agar bisa terlibat dalam rencana pembangunan. Hal ini sebagai upaya meminimalisir perbedaan pemahaman antara pembuat kebijakan dan bagi penerima dampak sebuah kebijakan. Yang tentunya juga meminimalisir masuknya kelompok-kelompok yang ingin menunggangi kepentingan-kepentingan demi mencapai tujuannya.

Melihat keadaan yang dialami oleh masyarakat akibat wacana pembangunan *geothermal* yang mengakibatkan sikap pro dan kontra di tengah masyarakat terkhusus untuk Wali Nagari Batu Bajanjang perlu mengambil sikap tegas dalam menyatukan kembali pemahaman masyarakat terkait pembangunan *geothermal*. Hal yang dirasa perlu untuk segera dilakukan oleh Pemerintah Nagari selaku pemimpin yang ada dalam nagari adalah melakukan musyawarah tentunya melibatkan seluruh elemen yang berada di Nagari Batu Bajanjang. Selanjutnya Lembaga Kerapatan Adat Nagari perlu

membentuk citra yang baik bagi masyarakat sesuai dengan fungsi Kerapatan Adat Nagari itu sendiri yaitu: lembaga nagari yang mengurus dan menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau. Hal ini termasuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat terutama untuk anak dan kemanakan. Pada saat ini perlu sekali bagi Lembaga Kerapatan Adat Nagari meredam tindakan-tindakan yang merugikan mereka tentunya dengan merangkul kembali anak kemanakan dan menegakkan kembali fungsi kelembagaan ini.

